



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TA 2024 (*AUDITED*)

KPKNL JAKARTA V

JALAN KKO USMAN DAN HARUN
NO. 10, SENEN, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPKNL Jakarta V adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jakarta V. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 07 Mei 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Partolo



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran	52



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, JAKARTA 10710
TELEPON; (021) 34835146; FAKSIMILE: (021) 34835155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 08 Mei 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Partolo

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 80.260.654.085,00 atau mencapai 156% dari estimasi pendapatan sebesar Rp 51.438.244.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 4.137.698.046,00 atau mencapai 95% dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.333.776.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 3.625.734.409,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.894.306.262,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 731.428.147,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 2.437.547.498,00 dan Rp 1.188.186.911,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 80.255.471.643,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 4.343.712.672,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 75.911.758.971,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 62.404.000,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 75.974.162.971,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 831.054.979,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 75.974.162.971,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,00 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (75.617.031.039,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 1.188.186.911,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL JAKARTA V LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	51,438,244,000	80,260,654,085	28,822,410,085	156	46,887,345,000	75,592,880,761	(28,705,535,761)	161
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	51,438,244,000	80,260,654,085	28,822,410,085	156	46,887,345,000	75,592,880,761	(28,705,535,761)	161
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	51,438,244,000	80,260,654,085	28,822,410,085	156	46,887,345,000	75,592,880,761	(28,705,535,761)	161
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,333,776,000	4,137,698,046	(196,077,954)	95	3,376,924,000	3,108,806,613	268,117,387	92
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	4,155,775,000	3,959,909,346	(195,865,654)	95	3,271,703,000	3,007,838,613	263,864,387	92
3. Belanja Modal	178,001,000	177,788,700	(212,300)	100	105,221,000	100,968,000	4,253,000	96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4.333.776.000	4.137.698.046	(196.077.954)	95	3.376.924.000	3.108.806.613	268.117.387	92
C. Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0

KPKNL JAKARTA V
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,437,280,099	53,617,782,037	(51,180,501,938)	(95.45)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	107,554,058	50,332,500	57,221,558	113.69
Persediaan	349,472,105	442,349,529	(92,877,424)	(21.00)
JUMLAH ASET LANCAR	2,894,306,262	54,110,464,066	(51,216,157,804)	(94.65)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,620,622,541	4,154,632,841	465,989,700	11.22
Aset Tetap Lainnya	22,852,900	22,852,900	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,912,047,294)	(3,838,782,947)	(73,264,347)	1.91
JUMLAH ASET TETAP	731,428,147	338,702,794	392,725,353	115.95
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	130,999,000	35,037,348	95,961,652	273.88
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(130,999,000)	(35,037,348)	(95,961,652)	273.88
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	3,625,605,351	54,449,166,860	(50,823,561,509)	(93.34)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,437,547,498	53,618,111,881	(51,180,564,383)	(95.45)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,437,547,498	53,618,111,881	(51,180,564,383)	(95.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,437,547,498	53,618,111,881	(51,180,564,383)	(95.45)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,188,186,911	831,054,979	357,131,932	42.97
JUMLAH EKUITAS	1,188,186,911	831,054,979	357,131,932	42.97
JUMLAH EKUITAS	1,188,186,911	831,054,979	357,131,932	42.97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,625,734,409	54,449,166,860	(50,823,432,451)	(93.34)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	80,255,342,585	75,223,188,428	5,032,154,157	6.69
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	80,255,342,585	75,223,188,428	5,032,154,157	6.69
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	80,255,342,585	75,223,188,428	5,032,154,157	6.69
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	219,080,134	146,670,627	72,409,507	49.369
Beban Barang dan Jasa	1,730,831,174	1,923,283,488	(192,452,314)	(10.006)
Beban Pemeliharaan	359,454,292	235,667,696	123,786,596	52.526
Beban Perjalanan Dinas	1,743,358,725	707,993,237	1,035,365,488	146.239
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	290,988,347	181,554,981	109,433,366	60.276
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,343,712,672	3,195,170,029	1,148,542,643	35.946
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	75,911,629,913	72,028,018,399	3,883,611,514	5.392
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	62,404,000	3,379,999	59,024,001	1,746.273
Pendapatan Pelepasan Aset	62,404,000	3,379,999	59,024,001	1,746.273
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	21,975,225	(21,975,225)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	21,975,225	(21,975,225)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	62,404,000	25,355,224	37,048,776	146.119
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	75,974,033,913	72,053,373,623	3,920,660,290	5.441
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	75,974,033,913	72,053,373,623	3,920,660,290	5.441

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
SURPLUS/DEFISIT-LO	75,974,162,971	72,053,373,623	3,920,789,348	5.44
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(75,617,031,039)	(72,412,765,648)	(3,204,265,391)	4.43
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	357,131,932	(359,392,025)	716,523,957	(199.34)
EKUITAS AKHIR	1,188,186,911	831,054,979	357,131,932	42.97

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta V

Dasar Hukum KPKNL Jakarta V didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Berkedudukan di Jalan Prajurit Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta. KPKNL Jakarta V mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran KPKNL Jakarta V diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berkomitmen dengan visi “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan” untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V melakukan beberapa langkah – langkah strategis sebagai berikut;

- Mewujudkan pelayanan yang baik secara efektif dan efisien kepada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.
- Memberikan citra positif sebagai perwakilan kementerian Keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Jakarta.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang,

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 (lima) kantor vertikal, yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V.

Pada tahun 2024 KPKNL Jakarta V berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,21%.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Jakarta V. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Jakarta V menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Jakarta V dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Jakarta V. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

*Pendapatan–
LRA*

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan–LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan–LO

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan–LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan Pendapatan–LO pada KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I diakui setelah disetor ke Kas Umum Negara;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang;

- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji diakui setelah terbit SP2D untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji PNS;
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis AkruaI

Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja KPKNL Jakarta V memperoleh alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp 3.849.170.000,00. Selama tahun 2024, dilakukan revisi DIPA terkait adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA TA 2024

Uraian	TA 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
Pendapatan		
Pendapatan PNB	51,438,244,000	51,438,244,000
Jumlah Pendapatan	51,438,244,000	51,438,244,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	3,671,169,000	4,155,775,000
Belanja Modal	178,001,000	178,001,000
Jumlah Belanja	3,849,170,000	4,333,776,000

Realisasi

Pendapatan

Rp

80.260.654.085,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 80.260.654.085,00. Pendapatan KPKNL Jakarta V terdiri Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, serta Pendapatan Anggaran lain-lain yang bersumber dari dana mengendap pada rekening bendahara penerimaan yang disetorkan ke kas negara. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			%REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	62,404,000	0	62,404,000	21.12%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0			
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	62,404,000	0	62,404,000	13.52%
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,000,000	0	2,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	2,000,000	0	2,000,000	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan	0				
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	37,954,839,000	20,713,804,037	0	20,713,804,037	54.57%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,646,674,000	3,210,469,520	0	3,210,469,520	121.30%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	10,836,731,000	56,272,148,161	181,818	56,271,966,343	519.27%
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 4257	51,438,244,000	80,196,421,718	181,818	80,196,239,900	155.91%
4259	Pendapatan Lain-lain	0				
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	180,010,185	180,000,000	10,185	0
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	0	0	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	180,010,185	180,000,000	10,185	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	51,438,244,000	80,440,835,903	180,181,818	80,260,654,085	156.03%
	JUMLAH PENDAPATAN	51,438,244,000	80,440,835,903	180,181,818	80,260,654,085	156.03%

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan 6.17% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	62,404,000	3,379,999	1746.27
Pendapatan Bea Lelang Kelas I	20,713,804,037	27,300,431,862	(24.13)
Pendapatan Biaya Adm Pengurusan Piutang Negara	56,271,966,343	45,129,076,214	24.69
Pendapatan Jasa Lainnya	2,000,000	582,522	243.33
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,210,469,520	3,149,898,004	1.92
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	487,543	(100.00)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	-	-	0.00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	10,185	9,024,617	(99.89)
Jumlah	80,260,654,085	75,592,880,761	6.17

Realisasi Belanja Negara
Rp
4.137.698.046,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 4.137.698.046,00 atau 95 % dari anggaran belanja sebesar Rp 4.333.776.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

NO	URAIAN	TA 2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	4.155.775.000	3.959.909.346	(195.865.654)	92
	BELANJA MODAL	178.001.000	177.788.700	(212.300)	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	3.376.924.000	4.137.698.046	(196.077.954)	95

Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 33 % dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan adanya peningkatan belanja non operasional berupa kenaikan honorarium wakil kerja penjaga aset eks BPPN dan belanja perjalanan dinas dalam negeri guna pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0.00
Belanja Barang	3,959,909,346	3,007,838,613	31.65
Belanja Bantuan Sosial	177,788,700	100,968,000	76.08
Belanja Modal	-	-	100.00
Jumlah	4,137,698,046	3,108,806,613	33.10

*Belanja Pegawai
Rp 0*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh sentralisasi belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0.00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0.00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0.00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Belanja Lembur	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

Belanja Barang

Rp

3.959.909.346,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah Rp 3.959.909.346,00 dan Rp 3.007.838.613,00. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 31% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada belanja barang pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	952,696,263	1,006,194,111	(5.32)
Belanja Barang Nonoperasional	719,348,087	762,058,149	(5.60)
Belanja Jasa	58,849,269	154,984,600	(62.03)
Belanja Pemeliharaan	359,454,292	235,667,696	52.53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,743,358,725	707,993,237	146.24
Belanja Barang Persediaan	126,202,710	140,940,820	(10.46)
Jumlah Belanja Kotor	3,959,909,346	3,007,838,613	31.65
Pengembalian Belanja			0.00
Jumlah Belanja	3,959,909,346	3,007,838,613	31.65

Belanja Modal

Rp

177.788.700,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 177.788.700.000,00 dan Rp 100.968.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 76% dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177,788,700	100,968,000	76.08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	177,788,700	100,968,000	76.08
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	177,788,700	100,968,000	76.08

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp 177.788.700,00, mengalami kenaikan sebesar 76% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp 100.968.000,00.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Kursi Roda	-	2,100,000	0.00
Meja Kerja	-	58,590,000	0.00
Kursi Kerja	-	19,160,000	0.00
Sofa Tamu Single Seater	-	15,414,001	0.00
Meja Sofa Tamu	-	5,703,999	0.00
Roller Blind	162,637,200	-	0.00
AC Split	15,151,500	-	0.00
Jumlah Belanja	177,788,700	100,968,000	76.08

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Pagar Permanen	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Belanja Bantuan
Sosial
Rp 0

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp

2.894.306.262,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.894.306.262,00 dan Rp 54.110.464.066,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp 0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp 0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Pendapatan Jasa Lainnya	-	4,834
Jumlah	-	4,834

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp
2.437.280.099,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.437.280.099,00 dan Rp 53.617.782.037,00.

Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP dan kas pada bendahara penerimaan yang merupakan dana pihak ketiga. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,437,280,099	53,617,782,037
Jumlah	2,437,280,099	53,617,782,037

Adapun untuk rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Rekening Lelang	803,525,000	1,431,820,000
Rekening Piutang	1,633,755,099	51,888,207,490
Rekening Valas	-	297,754,547
Jumlah	2,437,280,099	53,617,782,037

Jumlah saldo rekening valas Per 31 Desember 2023 sebesar US\$19.285,87 kemudian dikonversi ke rupiah dengan kurs JISDOR tanggal 29 Desember 2023 sebesar 1USD=Rp15.439,00 sehingga diperoleh nilai Rp.297.754.547,00.

Piutang Bukan
Pajak
Rp 0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Piutang Bukan Pajak

Keterangan	TA 2024	TA 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar
TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada
tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas)
bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian
Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp 0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah
sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau
kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp 0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31
Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang
ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2024	TA 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp 107.554.058,00

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 107.425.000,00 dan Rp 50.332.500,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	TA 2024	TA 2023
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	107,425,000	50,332,500
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	129,058	-
Jumlah	107,554,058	50,332,500

Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I di atas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta V dan kemudian disetorkan ke kas negara.

Rincian Penyetoran ke Kas Negara

Nilai Setoran	Tanggal Setor	NTPN
106,470,000	6 Januari 2025	A67EF48VVNNLBIDA
955,000	6 Januari 2025	9607761QVCSE5ENT
107,425,000		

Persediaan

Rp

349.472.105,00

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 349.472.105,00 dan Rp 442.349.529,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2024 terdapat penyesuaian nilai persediaan Koreksi kuantitas kurang sebesar Rp 92.877.424. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	349,472,105	442,349,529
Jumlah	349,472,105	442,349,529

Aset Tetap

Rp 731.428.147,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 731.428.147,00 dan Rp 338.702.794,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap KPKNL Jakarta V terdiri dari Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp 0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- Pembelian	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			-
Jumlah			-

Peralatan dan
Mesin

Rp
4.620.622.541,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 4.620.622.541,00 dan Rp 4.154.632.841,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4,154,632,841
Mutasi tambah:	
Pembelian	177,788,700
Transfer Masuk	562,800,000
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	274,599,000
Saldo per 31 Desember 2024	4,620,622,541
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	(3,912,047,294)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	708,575,247

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian Roller Blind senilai Rp162.637.200,00
- Pembelian AC Split 2 unit senilai Rp15.151.500,00
- Transfer masuk 4 unit komputer unit (laptop) senilai Rp23.800.000,00
- Transfer masuk 13 unit Buffet senilai Rp62.400.000,00
- Transfer masuk 61 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp206.000.000,00
- Transfer masuk 11 unit Lemari Besi/Metal senilai Rp56.650.000,00
- Transfer masuk 15 unit Meja Kerja Besi/Metal senilai Rp199.050.000,00

- h. Transfer masuk 1 unit Meja Kerja Besi/Metal senilai Rp14.900.000,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa penghentiaan penggunaan BMN:

- a. 1 unit Kendaraan Dinas Roda Empat senilai Rp143.600.000,00
b. 7 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp25.921.500,00
c. 6 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp97.135.500,00
d. 1 unit Meja Komputer senilai Rp1.012.000,00
e. 1 unit Meja Rapat senilai Rp6.930.000,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0*

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp 0*

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Aset Tetap

Lainnya

Rp 22.852.900,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 22.852.900,00 dan Rp 22.852.900,00. Aset Tetap tersebut berupa barang perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per 31 Desember 2024.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	22,852,900
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	
Saldo per 31 Desember 2024	22,852,900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	22,852,900

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Rp 0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp

3.912.047.294,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 3.912.047.294,00 dan Rp 3.838.782.947,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,620,622,541	3,912,047,294	708,575,247
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	22,852,900	-	22,852,900
Akumulasi Penyusutan		4,643,475,441	3,912,047,294	731,428,147

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp 0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran
Rp 0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian TPA

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Jangka Panjang
Rp 0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TPA atau TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Aset Lainnya
Rp 0*

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset

Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud **C.4.1. Aset Tak Berwujud**

Rp 0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
-	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain

Rp.

130.999.000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 130.999.000,00 dan Rp 35.037.348,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
-Penghentian Penggunaan	130,999,000
Mutasi kurang:	
-Penjualan Melalui Lelang	
Saldo per 31 Desember 2024	130,999,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(130,999,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp
130.999.000,00*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 130.999.000,00 dan Rp 35.037.348,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	130,999,000	130,999,000	-
Akumulasi Penyusutan		130,999,000	130,999,000	-

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp
2.437.547.498,00*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.437.547.498,00 dan Rp 53.618.112.344,00.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp 0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp
2.437.547.498,00

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.437.547.498,00 dan Rp 53.618.112.344,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Jakarta V per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.437.547.498	Dana milik BUMN/swasta/pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak serta dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi
Total	-	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp 0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

Ekuitas
Rp
1.188.186.911,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.188.186.911,00 dan Rp 831.054.979,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp

80.255.471.643,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 80.255.471.643,00 dan Rp 75.223.188.428,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK
Pendapatan Negara Bukan Pajak:			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	80,255,342,585	75,223,188,428	6.69
Jumlah	80,255,342,585	75,223,188,428	6.69

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya meliputi pendapatan biad pengurusan piutang negara, pendapatan bea lelang pegadaian, pendapatan bea lelang PL kelas I, pendapatan jasa lainnya dan pendapatan anggaran lain-lain yang transaksinya per 31 Desember 2024.

Dibawah ini dijelaskan perbandingan pendaparan LRA dengan pendapatan LO tahun 2024 sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Pendapatan pada LRA dan LO

URAIAN JENIS PENDAPATAN	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
Pendapatan Jasa Lainnya	2,000,000	2,000,000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	20,713,804,037	20,770,896,537	(57,092,500.00)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,210,469,520	3,210,598,578	(129,058.00)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	56,271,966,343	56,271,966,343	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	10,185	10,185	-
Jumlah	80,198,250,085	80,255,471,643	(57,221,558)

Selisih Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp57.092.500, yang berasal dari transaksi sebagai berikut:

1. Pembayaran Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2023 Rp50.332.500;
2. Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.554.058.

Beban Pegawai
Rp 0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	0.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	0.00
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Beban Uang Makan	-	-	0.00
Beban Lembur	-	-	0.00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Pengembalian Beban Uang Lembur	-	-	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Persediaan
Rp 219.080.134,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 219.080.134,00 dan Rp 146.670.627,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	219,080,134	146,670,627	49.37
Beban Perseidaiaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	0.00
Jumlah	219,080,134	146,670,627	49.37

Beban Barang dan Jasa **D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jasa

Rp

1.730.831.174,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.730.831.174,00 dan Rp 1.923.283.488,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	772,309,688	695,518,721	11.04
Beban Jasa Profesi	41,400,000	149,000,000	(72.21)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,812,520	32,059,000	(28.84)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,400,000	208,056,000	(48.38)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	38,000,000	(100.00)
Beban Bahan	130,772,687	153,771,550	(14.96)
Beban Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2,345,325	(100.00)
Beban Barang Non operasional Lainnya	588,575,400	608,286,599	(3.24)
Beban Langganan Telepon	3,237,324	3,248,728	(0.35)
Beban Sewa	14,212,500	2,719,500	422.61
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	50,111,055	30,278,065	65.50
Jumlah	1,730,831,174	1,923,283,488	(10.01)

Dibawah ini dijelaskan perbandingan pendaparan LRA dengan pendapatan LO tahun 2024 sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO

URAIAN JENIS BEBAN	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	772,309,688	772,309,688	-
Beban Jasa Profesi	41,400,000	41,400,000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,875,520	22,812,520	63,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,400,000	107,400,000	-
Beban Bahan	130,772,687	130,772,687	-
Beban Barang Non operasional Lainnya	588,575,400	588,575,400	-
Beban Langganan Telepon	3,236,769	3,237,324	(555)
Beban Sewa	14,212,500	14,212,500	-
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	50,111,055	50,111,055	-
Jumlah	1,730,893,619	1,730,831,174	62,445

Selisih Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp62.445,00, yang berasal dari transaksi sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 Rp318.844;
2. Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp267.399.

Beban

Pemeliharaan

Rp 359.454.292,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 359.454.292,00 dan Rp 235.667.696,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	359,454,292	235,667,696	52.53
Jumlah	359,454,292	235,667,696	52.53

Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada LRA dan LO

URAIAN JENIS BEBAN	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	359,454,292	359,454,292	-
Jumlah	359,454,292	359,454,292	-

Beban Perjalanan

Dinas

Rp
1.743.358.725,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.743.358.725,00 dan Rp 707.993.237,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,272,964,725	431,243,237	195.18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	470,394,000	276,750,000	69.97
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	0.00
Jumlah	1,743,358,725	707,993,237	146.24

Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas pada LRA dan LO

URAIAN JENIS BEBAN	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	1,272,964,725	1,272,964,725	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	470,394,000	470,394,000	-
Jumlah	1,272,964,725	1,272,964,725	-

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

*Beban Bantuan
Sosial
Rp 0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp 290.988.347,00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 290.988.347,00 dan Rp 181.554.981,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	290,988,347	181,554,981	60.28
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Penyusutan	290,988,347	181,554,981	60.28
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	290,988,347	181,554,981	60.28

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp 0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0.00

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Nonoperasional
Rp 62.404.000,00*

D.11. Kegiatan Nonoperasional

Pos Surplus dari Kegiatan Nonoperasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Nonoperasional pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Nonoperasional per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	62,404,000	3,379,999	1746.27
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	21,975,225	(100.00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	62,404,000	25,355,224	146.12

Surplus Kegiatan Nonoperasional berasal dari Pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain yaitu lelang 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dengan nilai sebesar Rp 62.404.000,00.

Pos Luar Biasa

Rp 0

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i>	E.1. Ekuitas Awal
<i>Rp</i>	
<i>831.054.979,00</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 831.054.979,00 dan Rp 1.190.447.004,00.
<i>Surplus LO</i>	E.2. Surplus (Defisit) LO
<i>Rp</i>	
<i>75.974.162.971,00</i>	Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 75.974.162.971,00 dan Rp 72.053.373.623,00. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, sampai dengan pos luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar</i>	E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
<i>Rp 0</i>	Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
<i>Rp 0</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
<i>Rp 0</i>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah

sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp 0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Koreksi Aset Tetap

Nonrevaluasi

Rp 0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain

Rp 0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain TA 2024

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp
(75.617.031.039,00)*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp (75.617.031.039,00) dan Rp (72.412.765.648,00). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	80,260,654,085
Ditagihkan ke Entitas Lain	(4,137,698,046)
Transfer Masuk	(505,925,000)
Transfer Keluar	-
Pengesahaan Hibah Langsung	-
Pengesahaan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(75,617,031,039)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp 80.260.654.085,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 4.137.698.046,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer

Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 505.925.000,00 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat DJKN	562,800,000
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(56,875,000)
Jumlah			505,925,000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

Ekuitas Akhir

Rp

1.188.186.911,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.188.186.911,00 dan Rp 831.054.979,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.01/2007 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan, maka dibentuklah jajaran baru Pejabat Pengelola Keuangan Satker sebagai Berikut:

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Partolo
Pejabat Pembuat Komitmen : Hari Santosa
PPSPM : Artho Guntoro
Bendahara Pengeluaran : Tri Wahyuningsih
Bendahara Penerimaan : Havivi Natapura

B. Pada tahun 2024 terdapat 1 Program Prioritas Nasional (PN) yaitu Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

URAIAN RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara	497,470,000.00	469,924,487.00	4	4

